



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 1

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640 3846402

SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S.1704/PB.1/2018

21 Maret 2018

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Intern Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditjen Perbendaharaan telah melakukan secara proaktif langkah-langkah peningkatan pengendalian intern sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 jo. KMK-435/KMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepatuhan internal Ditjen Perbendaharaan.
2. Berdasarkan pelaksanaan pemantauan pengendalian utama tahun 2017 pada Direktorat lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN didapatkan hasil rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan pemantauan pengendalian intern pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah sebesar 85,44%, pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebesar 99,61% dan pada KPPN sebesar 99,71%, KPPN Khusus Penerimaan 99,75%, KPPN Khusus Investasi 100% dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah 100%.
3. Dari hasil pemantauan pengendalian utama pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang belum mencapai 100% tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan pemantauan pengendalian intern yang dilakukan belum sesuai dengan perangkat pemantauan dan proses bisnis dari kegiatan tersebut, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap titik kritis kegiatan dalam rangka mengoptimalkan tingkat kepatuhan internal oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN (matriks titik kritis terlampir).
4. Memperhatikan hal-hal di atas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kanwil dan KPPN
    - 1) Mensosialisasikan potensi temuan/ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada para pemilik kegiatan/proses bisnis sesuai matriks titik kritis.
    - 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan pengendalian utama dengan membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan para pemilik kegiatan/proses bisnis.
    - 3) Segera menginformasikan kepada pemilik kegiatan/proses bisnis, mengenai potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan ketika akan dilaksanakan pemantauan pengendalian utama.
  - b. Kanwil
    - 1) Melakukan supervisi secara aktif terhadap pelaksanaan pemantauan pengendalian utama pada KPPN di wilayah kerja Kanwil, serta di lingkup internal Kanwil.
    - 2) Menginformasikan secara proaktif terkait permasalahan/masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian utama melalui *Liaison Officer* UKI-E1 pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Haryana

NIP 19600603 198502 1 0017

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan  
 Nomor : S-2104/PB.1/2018  
 Tanggal : 21 Maret 2018

**MATRIKS TITIK KRITIS KEGIATAN  
 DALAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA  
 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAN KPPN**

No	Nama Kegiatan	Frekuensi	Rata-Rata Tingkat Kepatuhan (%)	Titik Kritis
<b>Kanwil Ditjen Perbendaharaan</b>				
1	Kegiatan Pengesahan Revisi Anggaran	Dwi Mingguan	99,70	<p>Penerbitan surat pengesahan revisi anggaran melebihi batas waktu penyelesaian, yaitu 1 (hari) kerja setelah dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.</p> <p>Dokumen pengajuan revisi belum lengkap, antara lain copy DIPA terakhir, matriks perubahan.</p> <p>Terdapat surat pengesahan dan nota pertimbangan yang belum ditandatangani oleh pejabat berwenang.</p>
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Semesteran	99,74	<p>a. Checklist penerimaan bukti mutasi barang tidak sesuai dengan dengan penerimaan bukti mutasi barang</p> <p>b. Pengiriman penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan terlambat</p> <p>c. Opname fisik yang dilakukan pada proses penyusunan laporan BMN setiap semester.</p>

No	Nama Kegiatan	Frekuensi	Rata-Rata Tingkat Kepatuhan (%)	Titik Kritis
3	Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan mekanisme LS	Bulanan	99,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat PBJ</li> <li>b. Sertifikat PBJ pejabat pengadaan sudah tidak update</li> <li>c. Surat permintaan pengadaan dari PPK kepada PPBJ belum terlampir</li> <li>d. HPS yang disusun dan ditandatangani oleh PPK belum terlampir</li> <li>e. Brosur spesifikasi teknis dan harga barang sebagai pendukung HPS belum terlampir</li> <li>f. Surat penawaran dari calon penyedia belum terlampir</li> <li>g. Cek list penerimaan barang belum terlampir</li> </ul>
4	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil	Bulanan	99,81	Pengiriman Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil melebihi batas maksimum penyampaian laporan
Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Kegiatan			99,61	
<b>KPPN</b>				
1	Penerbitan SP2D LS Non Gaji	Harian	99,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Approval dari reviewer tidak sesuai dengan user dan norma waktu penyelesaian SP2D</li> <li>b. Approval dari Kepala Seksi PD tidak sesuai dengan user dan norma waktu penyelesaian SP2D</li> <li>c. ADK PMRT tidak diupload di SPAN</li> <li>d. Invoice tagihan yang belum diproses di SPAN</li> <li>e. Invoice tagihan yang belum dibatalkan</li> </ul>
2	Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN	Bulanan	99,77	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan rekonsiliasi



No.	Nama Kegiatan	Frekuensi	Rata-Rata Tingkat Kepatuhan (%)	Titik Kritis
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup KPPN	Semesteran	99,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Checklist penerimaan bukti mutasi barang tidak sesuai dengan dengan penerimaan bukti mutasi barang</li> <li>b. Pengiriman penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terlambat</li> </ul>
4	Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan mekanisme LS	Bulanan	99,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat PBJ</li> <li>b. Sertifikat PBJ pejabat pengadaan sudah tidak <i>update</i></li> </ul>
5	Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN	Bulanan	99,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan Persetujuan TUP tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan</li> <li>b. Penerbitan persetujuan/penolakan pemberian TUP diterbitkan oleh KPPN tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang dipersyaratkan</li> </ul>
6	Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Putih)	Harian	99,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening BUN sebagai bahan penyusunan buku putih yang menjadi sampel belum berstatus reconciled</li> <li>b. Buku putih tidak dilengkapi dengan rekening koran</li> </ul>
7	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah	Bulanan	99,98	Pengiriman Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Kanwil melebihi batas maksimum penyampaian laporan
Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Kegiatan			99,71	

No	Nama Kegiatan	Frekuensi	Rata-rata Tingkat Kepatuhan (%)	Titik Kritis
<b>KPPN Khusus Penerimaan</b>				
1.	Koreksi Data Penerimaan Negara Segmen COA KPPN 999	Bulanan	100	TIDAK ADA
2.	Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi	Dwimingguan	100	TIDAK ADA
3.	Penerbitan Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi karena kekurangan pelimpahan	Dwimingguan	100	TIDAK ADA
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Pos Penerimaan Negara	Bulanan	100	TIDAK ADA
5.	Kegiatan Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Secara Elektronik	Bulanan	98	Penyampaian DNP, LHP dan RK Elektronik Bank/Pos Persepsi pada portal rekonsiliasi
6.	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup KPPN	Semesteran	100	TIDAK ADA
7.	Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan mekanisme LS	Bulanan	100	TIDAK ADA
8.	Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN	Bulanan	100	TIDAK ADA
Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Kegiatan			99,75	
<b>KPPN Khusus Investasi</b>				
1.	Pencairan Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman dan Pinjaman	Bulanan	100	TIDAK ADA
2.	Pembebanan Klasifikasi Detail Transaksi Setelmen per Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	Bulanan	100	TIDAK ADA
3.	Pencairan Subsidi Bunga Kredit Program (SPAN)	Bulanan	100	TIDAK ADA
4.	Laporan konsolidasi kas lingkup KPPN	Harian	100	TIDAK ADA
5.	Penyusunan LK BA 999.03 LK BA 999.04 dan LK BA 999.07	Semesteran	100	TIDAK ADA
6.	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup KPPN	Semesteran	100	TIDAK ADA

7.	Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan mekanisme LS	Bulanan	100	TIDAK ADA
8.	Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN	Bulanan	100	TIDAK ADA
Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Kegiatan			100	
<b>KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah</b>				
1.	Penerbitan SP2D LS Non Gaji	Harian	100	TIDAK ADA
2.	Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN	Bulanan	100	TIDAK ADA
3.	Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Putih)	Harian	100	TIDAK ADA
4.	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup KPPN	Semesteran	100	TIDAK ADA
5.	Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan mekanisme LS	Bulanan	100	TIDAK ADA
6.	Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN	Bulanan	100	TIDAK ADA
7.	Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN	Bulanan	100	TIDAK ADA
Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Kegiatan			100	